

Iran Eksekusi Mati Seorang Pegulat

TEHERAN(IM) - Pihak berwenang Iran mengeksekusi mati seorang pegulat pada hari Senin atas tuduhan pembunuhan. Ini merupakan eksekusi kedua terhadap atlet gulat setelah September tahun lalu juara gulat Navid Afkari dieksekusi dan memicu kecaman internasional. Mehdi Ali Hosseini (30), dieksekusi mati di sebuah penjara di kota Dezful di provinsi Khuzestan barat daya. Asre Jonoob, pihak yang pertama kali melaporkan pelaksanaan hukuman terhadap pegulat tersebut yang dilansir Al Arabiya English, Selasa (26/1). "Bertentangan dengan klaim palsu dari media pembangkang, Hosseini bukanlah pegulat," lanjut Fars, mengutip seorang pejabat gulat setempat. Awal bulan ini, eksekusi Hosseini ditunda berkat kampanye untuk menyelamatkan hidupnya yang diikuti oleh beberapa pegulat profesional Iran, termasuk enam kali Juara Dunia Hamid Sourian. Iran mengeksekusi pegulat juara berusia 27 tahun Navid Afkari pada September, yang menaiki kecaman luas, termasuk dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Iran menuduh Afkari membunuh seorang penjaga keamanan selama protes anti-pemerintah pada tahun 2018—tuduhan yang ditolak pegulat yang dieksekusi dan keluarganya. Keluarga menyatakan bahwa dia disiksa untuk membuat pengakuan palsu. Seperti eksekusi terhadap Afkari, eksekusi terhadap Hosseini juga telah memicu protes dari publik Iran di media sosial, di mana beberapa kritikus rezim meminta Komite Olimpiade Internasional untuk melarang Iran mengikuti kompetisi. Pada tahun 2020, Iran mengeksekusi setidaknya 236 warga negara, dan 95 lainnya dijatuhi hukuman mati. Data ini berasal dari Human Rights Activists News Agency (HRANA), sebuah situs berita yang dijalankan oleh kolektif pembela hak asasi manusia Iran. **gul**



PELANTIKAN MENHAN AS LLOYD AUSTIN

Menteri Pertahanan AS yang baru Lloyd Austin menerima salaman siku dari Wakil Presiden Kamala Harris sebelum dilantik oleh Harris selama upacara singkat di Ruang Roosevelt di Gedung Putih di Washington, AS, Senin (25/1).

Terapkan Lockdown, Belanda Rusuh

Polisi Belanda menangkap 70 orang dalam kerusuhan pada Senin (25/1) malam.

DEN HAAG(IM) - Polisi Belanda menangkap 70 orang dalam kerusuhan pada Senin (25/1) malam. Kerusuhan terjadi di malam ketiga unjuk rasa memprotes jam malam dan peraturan pembatasan sosial pemerintah yang bertujuan memutus rantai penularan virus korona. Polisi anti huru-hara kota Rotterdam bertrok dengan sekelompok pengunjung rasa dan menembakan water canon

ke penjarah. Wali Kota Rotterdam mengeluarkan dekret yang memperluas wewenang polisi melakukan penangkapan. Saat kerusuhan menyebar ke kota-kota yang lebih kecil, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa di Haarlem, Amersfoort, Geleen dan Den Haag. Pada Selasa (26/1) Aljazeera melaporkan, Kepala Polisi Willem Woelders mengatakan

hingga Senin 21.00 waktu setempat polisi melakukan 70 penahanan. Melalui cicitannya di Twitter, Kepolisian Kota Geleen mengatakan mereka menghadapi 'remaja perusuh yang melemparkan petasan'. Perdana Menteri Mark Rutte mengancam kerusuhan yang ia sebut 'kekerasan pidana' di malam sebelumnya. Polisi Belanda mengatakan kerusuhan pada Minggu (24/1) lalu menjadi kerusuhan 'terburuk dalam 40 tahun terakhir'. Belanda menerapkan jam malam pertama mereka sejak Perang Dunia II. Kebijakan tersebut diterapkan usai Institut Kesehatan nasional (RIVM) memperingatkan gelombang baru wabah virus

Corona yang disebabkan varian baru yang berasal dari Inggris. Walaupun jumlah kasus infeksi dalam beberapa pekan terakhir mulai menurun. Pada Senin (25/1) Belanda melaporkan 4.129 kasus baru, terendah sejak Desember lalu. Pelanggar jam malam yang diberlakukan dari pukul 20.00 hingga 04.30 pagi ini dapat didenda 95 euro. Jam malam ini akan berakhir pada 10 Februari mendatang. Orang yang harus pergi bekerja, menghadiri pemakaman, dan membawa anjingnya jalan-jalan mendapat pengecualian dengan syarat menunjukkan sebuah surat resmi. Belanda menerapkan peraturan pembatasan sosial terketat

mereka. Sejak Oktober, negara Eropa itu menutup restoran dan bar sementara sekolah dan toko non-esensial baru ditutup pada bulan Desember. Foto-foto yang tersebar di media sosial menunjukkan perusuh menjarah toko-toko di Den Bosch. Seorang fotografer di Haarlem terkena lemparan batu bata dari pengunjung rasa yang marah. Kepala Serikat Polisi Koen Simmers mengatakan pada stasiun televisi NOS, polisi harus bersiap bila kerusuhan berlanjut. "Saya harap ini hanya terjadi satu kali tapi saya khawatir ini pertanda untuk beberapa hari dan pekan mendatang," kata Simmers. **tom**

Lebih 2,4 Juta Anak Suriah Putus Sekolah

DAMASKUS(IM) - Badan Anak-Anak PBB (UNICEF) memperkirakan lebih 2,4 juta anak di Suriah yang dilanda perang kehilangan pendidikan pada Ahad. Ada sepertiga sekolah hancur atau dikomando oleh para pejuang dan angka tersebut kian meningkat. "Setelah hampir sepuluh tahun perang di Suriah, lebih dari separuh anak terus kehilangan pendidikan. Jumlah ini kemungkinan meningkat pada 2020 karena dampak pandemi Covid-19 yang memperburuk gangguan pendidikan di Suriah," kata Kepala UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Ted Chaiban dalam sebuah pernyataan. Menurut dia, sistem pendidikan di Suriah kekurangan dana dan terpecah sehingga tidak bisa memberikan layanan yang aman, adil, dan berkelanjutan kepada jutaan anak. Perang saudara Suriah muncul pada tahun 2011 setelah penindasan kekerasan terhadap protes dan berubah cepat menjadi konflik kompleks. Banyak pihak yang terlibat, termasuk kelompok jihadis dan kekuatan asing. Lebih dari 387 ribu orang telah terbunuh dan lebih dari setengah populasi Suriah sebelum perang yang berjumlah 20 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. "Satu dari tiga sekolah di Suriah tidak dapat lagi digunakan karena hancur, rusak, atau digunakan untuk tujuan militer," tambah pernyataan itu. Dikutip Al Arabiya pada Senin (25/1), UNICEF menyebut sekolah-sekolah yang tetap beroperasi sering kali penuh sesak dan terletak di gedung dengan fasilitas air dan sanitasi yang tidak memadai, termasuk listrik, pemanas, atau ventilasi. UNICEF mengatakan pihaknya mengonfirmasi 52 serangan terhadap fasilitas pendidikan tahun lalu, menjadikan hampir 700 jumlah pelanggaran yang dikonfirmasi PBB terhadap sekolah dan staf pengajar. **ans**

PM Italia Dikabarkan akan Mengundurkan Diri

MILAN(IM) - Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte hampir mencapai keputusan untuk mengundurkan diri. Namun, kemudian berharap untuk membentuk pemerintahan baru yang dapat mengandalkan mayoritas yang lebih luas, sebagaimana dilaporkan La Repubblica, Senin (25/1). "Tujuan saya adalah menemukan kesepakatan yang memberikan perspektif politik yang jelas untuk

memerintah hingga akhir legislasi," kata Conte, menurut surat kabar La Repubblica. Laporan itu menambahkan bahwa Conte kemungkinan menyerahkan pengunduran dirinya kepada kepala negara yang paling cepat Selasa, dan kemudian membentuk koalisi baru yang akan menarik anggota parlemen berhaluan tengah, yang disebut "bertanggung jawab". Belum ada komentar langsung dari kantor perdana

menteri. Pemerintahan Conte dilanda kekecauan awal bulan ini ketika mitra junior, partai Italia Viva yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Matteo Renzi, menarik diri dari kabinet akibat pertikaian terkait penanganan krisis virus korona. Meskipun Conte selamat dari pemungutan suara di parlemen minggu lalu soal mosi percaya, dia gagal mengamankan mayoritas absolut di Senat.

Karena itu, dia akan bergulat dalam memberlakukan agenda kebijakan apa pun, kecuali dapat menarik dukungan baru. Perdana menteri telah mengimbau para anggota Senat yang berhaluan tengah dan tidak selaras untuk bergabung dengan jajaran pemerintah, tetapi sejauh ini hanya sedikit yang menanggapi. Surat kabar Corriere della Sera mengatakan Conte ingin Renzi kembali. Ia juga ingin menciptakan "pemerintahan

keamanan nasional", yang juga akan mendapat dukungan dari beberapa politisi kanan-tengah moderat. Untuk memberi tekanan pada anggota parlemen, partai-partai utama yang berkuasa mengatakan pemilihan cepat yang berlangsung dua tahun lebih cepat dari jadwal akan menjadi satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan politik, kecuali solusi dapat segera ditemukan. **ans**

Saima Mohsin, Jaksa Muslimah Pertama AS

DETROIT(IM) - Mulai bulan depan, jaksa federal baru di Detroit, Amerika Serikat (AS) adalah Saima Mohsin. Dia adalah muslimah pertama yang menjadi jaksa federal AS. Mulai 2 Februari, Mohsin (52), akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Federal AS untuk Distrik Michigan timur setelah Jaksa Federal AS saat ini untuk distrik tersebut, Matthew Schneider, mengundurkan diri pada 1 Februari. Menjabat selama tiga tahun, Schneider mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Kamis dan mengatakan Mohsin, yang saat ini adalah asisten pertama Jaksa Federal AS untuk Michigan timur, akan menggantikannya. Lahir di Pakistan, Mohsin telah menjadi jaksa selama beberapa dekade, bekerja sejak 2002 di Kantor Kejaksaan AS. Sebagai seorang imigran keturunan Asia yang beragama Islam, dia akan membawa keberagaman ke posisi penting sebagai kepala penegak hukum federal di bagian timur negara bagian Michigan. Departemen Kehakiman dalam rilis pers, yang dilansir dari Detroit Free Press, Selasa (26/1), mengatakan Mohsin telah bertugas di Unit Kejahatan dan Kejahatan Terorganisir Kantor Kejaksaan AS, Satuan Tugas Narkoba dan Unit Kejahatan Umum. "Saya sangat senang meninggalkan kantor ini di tangan salah satu jaksa federal terbaik yang pernah saya kenal, Saima Mohsin," kata Schneider. "Saima adalah pengacara pengadilan yang dinamis dan manajer yang berbakat. Dan, sebagai wanita pertama, imigran, Jaksa Muslim Amerika Serikat dalam sejarah Amerika, pengabdiannya benar-benar bersejarah. Saima akan menjadi perwakilan dan pembela

komunitas kami yang luar biasa sebagai Plt Jaksa AS." Dua pemimpin Council on American-Islamic Relations (CAIR), sebuah kelompok advokasi Muslim dan hak-hak sipil, mengatakan kepada Detroit Free Press bahwa mereka selama ini tidak mengetahui adanya Jaksa AS atau Plt Jaksa yang Muslim. Mohsin juga diyakini sebagai Jaksa Federal AS pertama yang berkebangsaan Pakistan-Amerika. "Saya tidak percaya bahwa pernah ada Jaksa Muslim AS," kata Gaider Abbas, pengacara CAIR. Michigan memiliki jumlah Muslim yang cukup besar dan juga populasi Pakistan-Amerika dengan beberapa masjid di seluruh wilayah. Beberapa Muslim telah menjadi jaksa yang bekerja untuk kantor Kejaksaan di Michigan. Jaksa Umum Michigan, Fadwa Hammoud, yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Dana Nessel untuk memimpin penyelidikan air Flint, adalah seorang Muslim. Tapi belum ada jaksa federal yang beragama Islam. Posisi Plt Jaksa AS bukanlah posisi permanen dan hakim nantinya dapat memilih Jaksa AS sementara. Presiden Joe Biden kemudian dapat mencalonkan seseorang untuk mengisi posisi tersebut, yang harus dikonfirmasi oleh Senat AS. Presiden Donald Trump saat itu memoniskan Schneider pada 2018 dan Senat AS mengonfirmasi dia pada 2019. Mohsin lulus dari Rutgers University di New Jersey. Dia menjadi asisten jaksa wilayah di New York City dan kemudian bekerja untuk Divisi Keadilan Pidana negara bagian New Jersey, melayani sebagai wakil jaksa agung dalam kejahatan terorganisir dan pemerasan. **gul**

Donald Trump Terancam Tak Bisa Nyapres 2024

WASHINGTON(IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) resmi mengirim satu artikel pemakzulan terhadap Donald Trump ke Senat pada hari Senin. Jika dinyatakan bersalah oleh Senat dalam sidang pemakzulan, miliarder itu tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden AS pada 2024. DPR Amerika mengajukan pemakzulan terhadap Donald Trump atas tuduhan menghasut pendukungnya melakukan penyerbuan terhadap Gedung Capitol AS pada 6 Januari lalu. Langkah DPR ini akan memicu Senat untuk memulai sidang pemakzulan. Trump memang sudah lengser sejak 20 Januari 2021. Namun, DPR AS tetap ingin statusnya sebagai presiden yang dimakzulkan. Dalam proses yang khusus, sembilan manajer pemakzulan DPR diam-diam membawa artikel tersebut melalui aula berornamen yang sama di Kongres dan mengirimkannya ke Senat. Anggota DPR Jamie Raskin dari Maryland kemudian membacakan dakwaan terhadap Trump di lantai Senat, di mana mantan presiden terus menik-

mati dukungan signifikan dari senator Republik. Sidang Senat terhadap Trump akan dimulai pada 8 Februari dan akan menjadi sidang pemakzulan yang kedua. Pada sidang pemakzulan yang pertama tahun lalu, Trump diselamatkan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan 100 anggota Senat, yang akan bertindak sebagai juri atau hakim, akan dilantik hari ini dan surat panggilan dikeluarkan untuk mantan presiden Trump. Demokrat dan Republik setuju untuk menunda dimulainya persidangan Senat selama dua minggu untuk memungkinkannya Trump mempersiapkan pembelaannya terhadap tuduhan "penghasutan pembekantan" dan agar Senat mengonfirmasi calon kabinet Presiden Joe Biden. Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts memimpin sidang Senat sebelumnya—yang berakhir dengan pembebasannya—tetapi yang memimpin kali ini adalah pres-

iden Senat untuk sementara. Presiden pro-tempore adalah senator senior partai dengan mayoritas di Senat, yang saat ini adalah Demokrat. Patrick Leahy, 80, yang terpilih menjadi Senator pada tahun 1974, memegang posisi tersebut. Senator Republik John Cornyn mengatakan bahwa seorang senator berfungsi sebagai hakim menimbulkan konflik kepentingan, tetapi senator Republik lainnya, Lindsey Graham, menepis kekhawatirannya. "Saya sudah lama mengenal Pat," kata Graham. "Saya percaya dan berharap dia akan adil," ujarnya, seperti dikutip AFP, Selasa (26/1). Leahy mengatakan dia akan bersumpah untuk tidak memihak. "Presiden pro-tempore secara historis memimpin persidangan pemakzulan Senat terhadap non-peserta," kata Leahy dalam sebuah pernyataan. "Saat memimpin sidang pemakzulan, presiden pro-tempore mengambil sumpah khusus tambahan untuk melakukan keadilan imparial sesuai konstitusi dan undang-undang," ujarnya. "Itu adalah sumpah yang saya anggap sangat serius." **tom**



UNJUK RASA DI TRIPOLI - LEBANON
Demonstran berdiri di dekat ban yang terbakar selama protes menentang penguncian dan kondisi ekonomi yang memburuk, di tengah penyebaran virus korona (COVID-19), di Tripoli, Lebanon, Senin (25/1).

Demonstran di Tunisia Meninggal Picu Demonstrasi Lebih Besar

TUNIS(IM) - Seorang pengunjung rasa Tunisia yang terluka dalam bentrokan dengan polisi telah meninggal di rumah sakit. Peristiwa ini pun menyebabkan lebih banyak konfrontasi dengan kekerasan antara demonstran dan layanan keamanan di kota Sbeitla. Laporan media pemerintah TAP pada Senin (25/1) menyatakan Kantor Kejaksaan di Kasserine, kota terbesar di dekat Sbeitla, sekitar tiga jam di selatan Tunisia telah memerintahkan autopsi untuk menentukan penyebab kematian Haykel Rachdi. Setelah berita kematiannya, sekelompok pemuda mencoba menyerbu dan membakar kantor polisi di Sbeitla yang menyebabkan lebih banyak bentrokan. Keluarga Rachdi mengatakan kepada media lokal bahwa anggota keluarganya itu dikejutkan oleh tabung gas air mata setelah bergabung dengan protes yang meletus bulan ini. Protes ini dilakukan dalam rangka peringatan revolusi Tunisia 2011 yang membawa demokrasi. Berita meninggalnya Rachdi menaikkan suhu menjelang demonstrasi atas ketidaksetaraan dan pelanggaran polisi yang direncanakan di Tunisia dan kota-kota lain dan didukung oleh kelompok-kelompok hak asasi pada Selasa (26/1). Meskipun Tunisia memiliki pemilihan umum yang terbuka dan kebebasan berbicara yang lebih besar, revolusinya telah gagal memberikan manfaat materi bagi sebagian besar warga negara. Negara ini masih menghadapi ekonomi yang telah goyah selama bertahun-tahun dan layanan publik yang menurun. **gul**



UNJUK RASA PADA AUSTRALIA DAY
Para demonstran menghadiri unjuk rasa pada Australia Day, menyatakan bahwa hari nasional negara itu diubah, karena tanggal tersebut menandai kedatangan armada pertama Inggris dan penjajahan berikutnya dari penduduk asli Australia, di Sydney, Australia, Selasa (26/1).